

BAB I

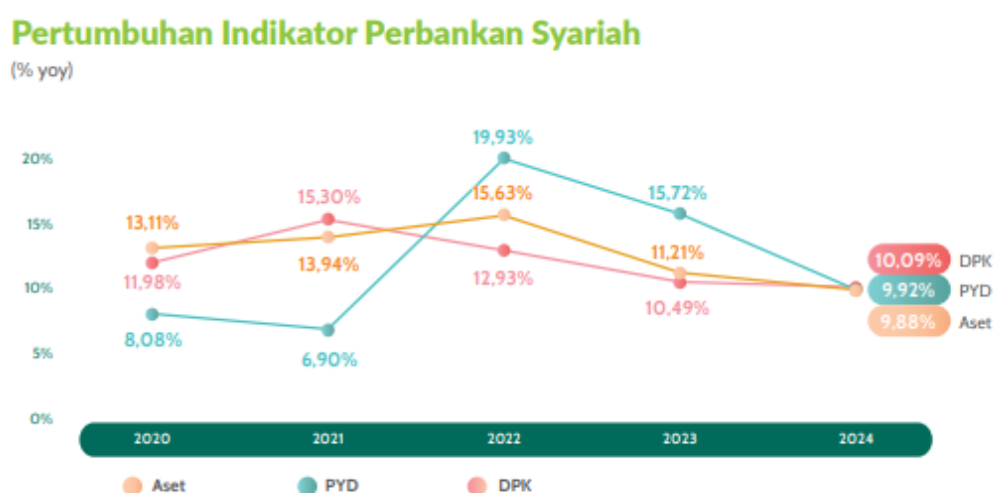
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, merujuk pada akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal yang memadai oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Secara global, eksklusi keuangan masih menjadi tantangan utama, di mana miliaran penduduk dewasa di dunia belum memiliki akses terhadap rekening bank resmi, dengan konsentrasi besar di negara-negara berkembang (World Bank, 2022). Akses yang memadai terhadap tabungan, kredit, dan sistem pembayaran menjadi penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Secara global, eksklusi keuangan masih menjadi masalah struktural yang signifikan, dengan World Bank mencatat miliaran penduduk dewasa di dunia belum terjangkau layanan perbankan resmi, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh (Fauzi & Nuryasman, 2025) yang berfokus pada mekanisme peningkatan inklusi keuangan sangat relevan bagi pengembangan kebijakan ekonomi.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp 3.072 triliun, meningkat 8,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar sebesar 10,81% terhadap total aset industri keuangan nasional. Pertumbuhan ini menegaskan kontribusi signifikan sektor keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus, perbankan syariah menjadi kontributor utama dengan total aset mencapai Rp 980,29 triliun atau tumbuh 9,88% (year on year) pada tahun 2024. Kinerja positif ini

menunjukkan ketahanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip Islam di tengah tantangan ekonomi global. Selain itu, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas tata kelola, dan konsolidasi kelembagaan seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga memperkuat struktur industri keuangan syariah nasional. Hal ini didukung oleh (Kusuma dan Wibowo,2024) dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, proses konsolidasi perbankan syariah melalui pembentukan BSI terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif sektor keuangan syariah Indonesia.



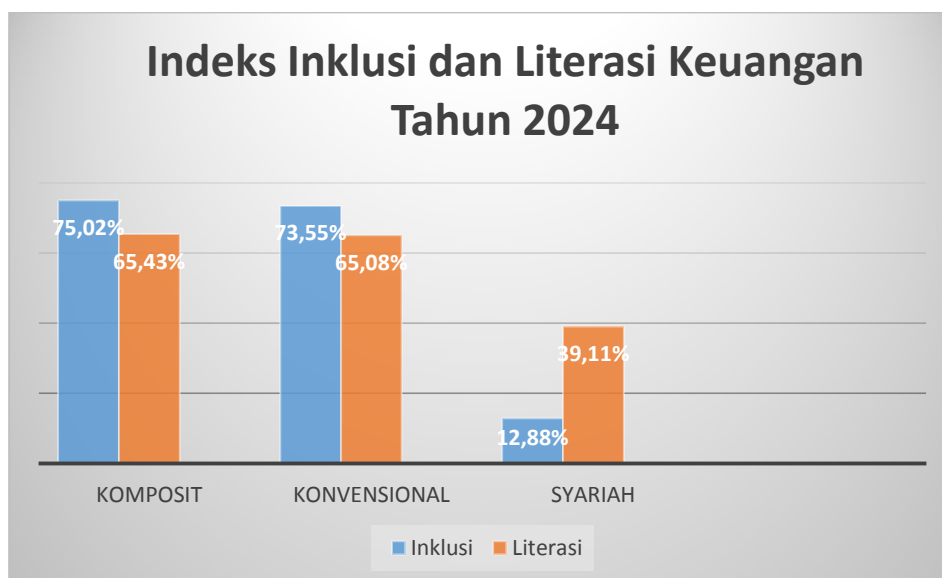
Gambar 1.1 Pertumbuhan Indikator Perbankan Syariah 2024

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada Gambar 1.1. Dari segi intermediasi, realisasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp643,55 triliun, atau tumbuh 9,92% yoy. Total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp753,60 triliun, atau tumbuh 10,09% yoy (OJK,2024).

Hasil survey tingkat literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Tahun 2024 Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43% , sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 % . SNLIK tahun 2024 juga mengukur

tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 %. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 % yang artinya literasi keuangan masyarakat Indonesia tergolong cukup rendah (OJK, 2024). Hal ini memperlihatkan, kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan sektor keuangan syariah belum sepenuhnya diimbangi dengan edukasi publik yang memadai dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk syariah menjadi kunci untuk memperluas akses dan partisipasi keuangan syariah di Indonesia. Lebih lanjut, bentuk inklusi dan Literasi keuangan dapat dilihat dari perbandingan gambar dibawah ini.

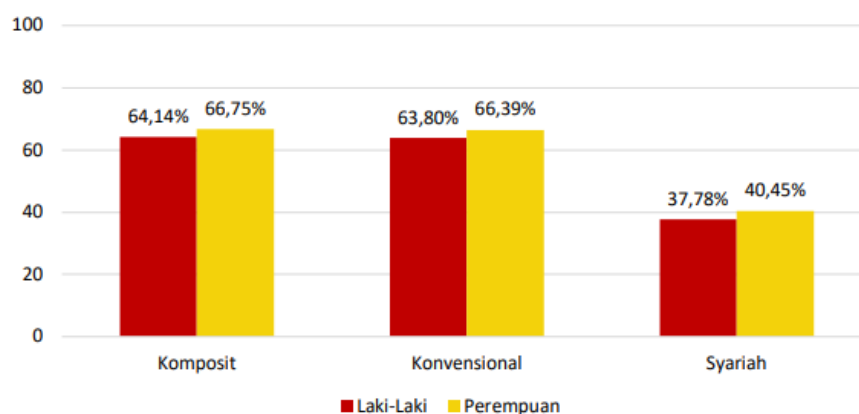


Gambar 1.2 Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

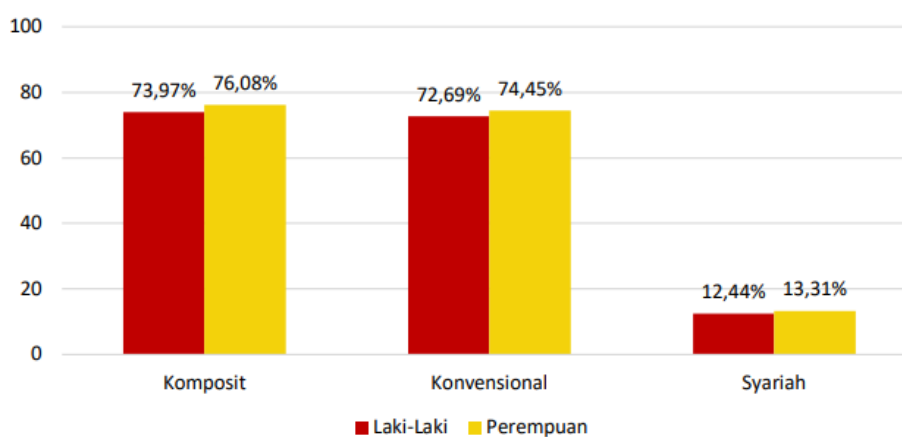
Pada Grafik 1.2 indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 75,02%, indeks inklusi keuangan konvensional Indonesia sebesar 73,55% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Sementara Indeks Literasi Keuangan Tahun 2024 Menunjukkan Tingkat Literasi Keuangan konvensional sebesar 65.08%. Sementara itu Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mencapai 39,11%. Dengan Selisih Literasi Keuangan Konvensional

dan Syariah Sebesar 25,97% (OJK,2024). Jika dilihat berdasarkan gender. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:



Gambar 1.3 Indeks Literasi Keuangan berdasarkan gender Tahun 2024

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Gambar 1.4 Indeks Inklusi Keuangan berdasarkan gender Tahun 2024

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

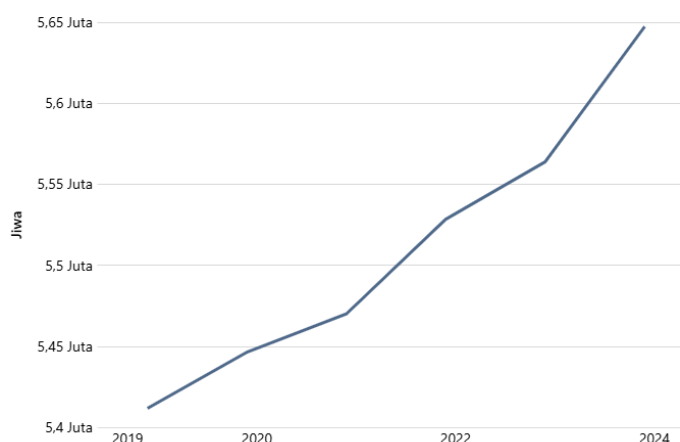
Pada Grafik 1.3. indeks literasi keuangan perempuan tercatat sebesar 66,75%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 64,14%. Hal serupa juga terlihat pada

grafik 1.4 indeks inklusi keuangan, di mana perempuan memiliki indeks sebesar 76,08%, sementara laki-laki sebesar 73,97%. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan adanya variasi karakteristik berdasarkan gender yang berpotensi memengaruhi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, termasuk dalam konteks perbankan syariah.

Akses fisik terhadap layanan keuangan formal tidak serta-merta menjamin terwujudnya inklusi keuangan yang optimal. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan individu yang memungkinkan pengambilan keputusan keuangan secara efektif. Rendahnya tingkat literasi keuangan terbukti menjadi hambatan kognitif utama karena membatasi kemampuan individu dalam memahami kompleksitas produk keuangan, termasuk risiko dan manfaatnya, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal. Selain faktor kognitif, perilaku keuangan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Menurut Hoftstede (2011) menjelaskan bahwa nilai budaya seperti kolektivisme dan kecenderungan penghindaran risiko membentuk preferensi masyarakat dalam mengelola keuangan. Dalam konteks Indonesia, Panggabea dan Hariwibowo (2021) menemukan bahwa kuatnya nilai budaya lokal, seperti gotong royong dan kepercayaan sosial, mendorong masyarakat khususnya pelaku Usaha Kecil dan menengah (UKM) dan komunitas pedesaan untuk lebih mengandalkan mekanisme keuangan non-formal (Arisan, pinjaman keluarga, rentenir).

Sumatera Barat memiliki karakter sosial budaya yang kuat dan tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam. Hal ini terlihat dari menyatunya nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang dijalankan melalui prinsip *adat basandi*

syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai pedoman sosial dan kelembagaan masyarakat (Kemendikbudristek, 2023; Kementerian Agama RI, 2024). Data kependudukan tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 97,6% penduduk Sumatera Barat beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman menjadi faktor dominan dalam membentuk pola sikap dan perilaku masyarakat (BPS, 2024; Katadata, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa, kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi lembaga keuangan syariah. Disatu sisi, potensi pasar sangat besar. disisi lain, tingkat literasi keuangan yang masih rendah membatasi pemanfaatan layanan syariah secara optimal. Pendekatan berbasis nilai dan edukasi budaya keuangan Islami diperlukan agar inklusi keuangan syariah dapat berkembang lebih luas di wilayah religius seperti Sumatera barat.



Gambar 1.5 Statistik Penduduk Beragama Islam di Sumatera Barat 2015-2024

(Sumber : Databoks 2024)

Pada gambar 1.5 Berdasarkan data *Databoks* (2024), jumlah penduduk beragama Islam di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 5,65 juta jiwa, meningkat 83.401 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki karakter masyarakat yang sangat religius dan kuat dalam

menjalankan nilai-nilai Islam. Meskipun perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif, tingkat inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan literasi keuangan serta kuatnya pengaruh budaya dan nilai agama dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat (OJK, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa situasi ini menunjukkan nilai adat dan agama yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sering membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih layanan keuangan, dan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di wilayah seperti Sumatera Barat, dibutuhkan pendekatan edukatif yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam akses keuangan formal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), jumlah penduduk Kota Padang mencapai sekitar 954.565 jiwa, dengan sekitar 96–97% di antaranya beragama Islam. Artinya, terdapat lebih dari 900.000 jiwa penduduk Muslim yang menetap di Ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki karakter masyarakat yang sangat religius, dimana nilai-nilai keislaman menjadi dasar dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Namun, potensi besar tersebut belum termanfaatkan sepenuhnya karena tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih tergolong rendah (OJK, 2024) dan pengaruh nilai-nilai budaya lokal yang kuat turut memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat (Panggabean & Hariwibowo, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa, kondisi ini menunjukkan keuangan syariah di Kota Padang memiliki peluang besar untuk berkembang, tetapi masih membutuhkan upaya peningkatan literasi keuangan dan edukasi publik yang sejalan dengan nilai-nilai budaya dan keislaman masyarakat setempat dan strategi pengembangan inklusi keuangan syariah di Kota Padang harus berbasis pada pendekatan edukatif dan kultural agar partisipasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

Berangkat dari isu dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam peran perilaku gender sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara literasi keuangan dan budaya keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah pada masyarakat mayoritas muslim. Kompleksitas pengambilan keputusan keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keuangan, nilai-nilai budaya, serta perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan menuntut adanya instrumen penelitian yang mampu menangkap kondisi tersebut secara akurat. Oleh karena itu, sebelum pengumpulan data utama dilakukan, penelitian ini diawali dengan uji awal (pre-test) terhadap kuesioner.

Uji awal kuesioner dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan mudah dipahami oleh responden, tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta telah sesuai dengan konteks perbankan syariah dan karakteristik masyarakat muslim yang menjadi objek penelitian. Selain itu, uji awal ini bertujuan untuk menilai kesesuaian indikator dengan konstruk penelitian, sehingga instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur literasi keuangan, budaya keuangan, perilaku gender, dan inklusi keuangan secara tepat. Dengan dilakukannya uji awal kuesioner, diharapkan data yang diperoleh pada tahap penelitian utama memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 1. Jawaban Responden

Pertanyaan	STS	TS	Dalam Persen			Total
			N	S	SS	
Akses Layanan Keuangan						
Syariah						
Saya dapat mengakses keuangan perbankan syariah dengan mudah			6,9%	48,3%	44,8%	100 %
Saya dapat mengakses layanan keuangan perbankan syariah secara praktis			6,9%	48,3%	44,8%	100 %
Saya dapat mengakses layanan keuangan perbankan syariah dengan biaya yang terjangkau			3,4%	62,1%	34,5%	100 %
Penggunaan						
Saya menggunakan layanan keuangan perbankan syariah modern seperti mobile banking syariah atau aplikasi perbankan syariah		3,4%	6,9%	31%	58,6%	100 %
Saya akan terus menggunakan produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan saya			13,8%	48,3%	37,9%	100 %
Kualitas						
Saya merasa layanan keuangan perbankan syariah mampu memenuhi kebutuhan keuangan saya			13,8%	41,4%	44,8%	100%
Saya merasa produk keuangan syariah dapat mendukung pencapaian tujuan keuangan saya			6,9%	51,7%	41,4%	100%

Sejalan dengan isu penelitian, hasil uji awal kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang cukup positif terhadap akses, penggunaan, dan kualitas layanan perbankan syariah, namun masih terdapat beberapa aspek yang menimbulkan keraguan. Pada aspek akses, sebanyak 48,3% responden menyatakan setuju dan 44,8% sangat setuju bahwa layanan perbankan syariah mudah dan praktis diakses, namun pada keterjangkauan biaya persetujuan responden relatif lebih rendah, dengan 62,1% setuju, 34,5% sangat setuju, dan masih terdapat 3,4% responden yang bersikap netral. Dari sisi penggunaan, adopsi layanan perbankan syariah berbasis digital tergolong tinggi, di mana 58,6% responden sangat setuju dan 31% setuju menggunakan layanan perbankan syariah modern, tetapi terkait keberlanjutan penggunaan masih terdapat 13,8% responden yang bersikap netral. Pada dimensi kualitas, sebagian besar responden menilai layanan perbankan syariah mampu memenuhi kebutuhan dan mendukung tujuan keuangan, dengan 41,4%–51,7% responden menyatakan setuju dan 41,4%–44,8% sangat setuju, meskipun masih terdapat 6,9%–13,8% responden yang belum memiliki keyakinan penuh. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan dan budaya keuangan berperan penting dalam membentuk perilaku keuangan masyarakat, dengan perilaku gender berpotensi memoderasi hubungan tersebut, sehingga penelitian ini relevan untuk memberikan dasar empiris dalam perumusan strategi peningkatan inklusi keuangan perbankan syariah yang lebih adaptif, responsif terhadap perbedaan gender, dan berkelanjutan pada masyarakat mayoritas muslim.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah pada masyarakat di kota Padang?
- 2 Bagaimana pengaruh budaya keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah pada masyarakat di kota Padang?

- 3 Apakah perilaku gender memoderasi hubungan antara literasi keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah di Kota Padang?
- 4 Apakah perilaku gender memoderasi hubungan antara budaya keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah pada masyarakat di kota Padang.
- 2 Menganalisis pengaruh budaya keuangan terhadap inklusi keuangan dalam perbankan syariah.
- 3 Mengevaluasi peran perilaku gender sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara literasi keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah di Kota Padang.
- 4 Mengevaluasi peran perilaku gender sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara budaya keuangan terhadap inklusi keuangan perbankan syariah di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana literasi dan budaya keuangan berperan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa aspek sosial seperti perilaku gender dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal.

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan

memperkaya literatur akademik dalam bidang keuangan syariah serta menjadi dasar pengembangan model penelitian baru yang menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu. Hal ini penting untuk memperkuat landasan teori dalam memahami inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perbankan Syariah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui program edukasi dan sosialisasi literasi keuangan serta penguatan budaya keuangan masyarakat, sehingga penggunaan layanan perbankan syariah dapat meningkat. Bagi Industri Perbankan Syariah: Hasil studi ini dapat dijadikan masukan strategis bagi bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan.
2. Bagi otoritas terkait: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan serta program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel, metode, dan objek penelitian yang berbeda.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus penelitian agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini adalah Inklusi keuangan dalam konteks layanan Perbankan syariah. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menganalisis fenomena

bagaimana masyarakat mengakses dan memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah.

2. Variabel Penelitian

X_1 : Literasi Keuangan: Tingkat pemahaman, pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan individu dalam mengenali, memahami, serta menggunakan produk dan layanan keuangan perbankan syariah secara tepat dan bertanggung jawab.

X_2 : Budaya Keuangan: Sekumpulan nilai, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola uang, mengambil keputusan finansial, serta berhubungan dengan lembaga keuangan.

Z: Perilaku Gender: Perbedaan antara laki laki dan perempuan pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya dapat menghasilkan tugas dan peran yang berbeda

Y: Inklusi Keuangan Perbankan Syariah: Kondisi dimana masyarakat memiliki akses, menggunakan, memperoleh kualitas layanan, serta merasakan manfaat dari layanan perbankan syariah.